

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Kebijakan *Liquefied Petroleum Gas* (LPG) bersubsidi merupakan salah satu instrumen kebijakan publik yang diimplementasikan oleh pemerintah Indonesia untuk mendukung ketersediaan energi bersih bagi masyarakat, terutama kelompok menengah ke bawah. Pada APBN 2025, Badan Anggaran DPR bersama pemerintah telah menyepakati alokasi subsidi LPG 3 kg sebesar Rp87,6 triliun, meningkat dari pagu tahun 2024 sebesar Rp85,6 triliun (E-Media DPR RI, 2025). Volume subsidi LPG 3 kg tahun 2025 yang sudah ditetapkan sebesar 8,17 juta ton juga menunjukkan komitmen pemerintah untuk menjaga keterjangkauan energi bagi masyarakat (Kementrian ESDM RI, 2024). Namun, meskipun alokasi anggaran yang besar menunjukkan komitmen pemerintah, implementasi kebijakan ini seringkali menghadapi tantangan di lapangan, seperti kelangkaan gas LPG 3 kg dan distribusi yang tidak merata. Fenomena ini tidak hanya menyulitkan masyarakat kecil yang bergantung pada gas bersubsidi, tetapi juga memicu ketidakpuasan dan memengaruhi dinamika persepsi publik terhadap kebijakan ini.

Pada awal tahun 2025, kebijakan subsidi LPG bersubsidi kembali menjadi sorotan tajam akibat kelangkaan gas LPG 3 kg yang melanda berbagai daerah di Indonesia, termasuk Kota Cirebon. Salah satu subpenyalur resmi Pertamina di Jakarta melaporkan bahwa setiap harinya agen hanya memberikan 5-10 tabung gas untuk dijual, jauh dari kebutuhan masyarakat (Metro TV, 2025). Di Kota Cirebon, kelangkaan gas LPG 3 kg semakin dirasakan oleh masyarakat, terutama di wilayah Panjunan, Kecamatan Lemahwungkuk. Menurut laporan media lokal, pengecer gas

LPG 3 kg di sekitar wilayah tersebut mulai mengalami kesulitan mendapatkan stok (Radar Cirebon TV, 2025). Salah satu penyebab utama kelangkaan ini adalah kebijakan pemerintah yang melarang pengecer menjual gas langsung kepada masyarakat. Kebijakan ini mewajibkan warga untuk membeli gas dari agen atau pangkalan resmi, yang sering kali menyebabkan antrean panjang dan ketidaknyamanan bagi masyarakat. Banyak warga yang harus menempuh jarak jauh hanya untuk mendapatkan gas bersubsidi, sementara harga di tingkat pengecer cenderung lebih tinggi dibandingkan harga resmi. Situasi ini memicu ketidakpuasan di kalangan masyarakat, yang mulai mempertanyakan efektivitas kebijakan subsidi LPG bersubsidi. Fenomena ini menciptakan dinamika persepsi publik yang kompleks, di mana masyarakat tidak hanya mengkritik kebijakan larangan penjualan oleh pengecer, tetapi juga mempertanyakan transparansi distribusi gas di tingkat lokal.

Dinamika persepsi publik terhadap kebijakan LPG bersubsidi pada tahun 2025 dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti informasi yang disampaikan oleh media massa, komunikasi pemerintah, pengalaman langsung masyarakat, serta isu-isu ekonomi dan politik yang berkembang pada saat itu. Media massa, misalnya, memainkan peran penting dalam membentuk persepsi masyarakat melalui *framing* berita dan *agenda-setting* (McCombs & Shaw, 1972). Media massa sering kali membingkai kelangkaan gas sebagai kegagalan pemerintah dalam mengelola distribusi, yang memperburuk persepsi masyarakat. Sementara itu, komunikasi pemerintah yang minim, seperti kurangnya sosialisasi tentang larangan penjualan gas oleh pengecer, menciptakan ketidakpuasan di kalangan masyarakat. Protes

warga terhadap kebijakan LPG bersubsidi juga tercermin Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengunjungi lokasi antrean gas 3 kg di Tangerang Selatan, Bahlil diteriaki oleh seorang warga yang menyampaikan keresahannya secara langsung. 'Jangan begini pak, lihat dampaknya, kami harus mengantre seperti ini. Minimal ada sosialisasi pak, kasih kami waktu jangan menyusahkan kami dengan aturan itu, jangan rakyat yang dikorbankan,' (TEMPO, 2025). Insiden ini menunjukkan bahwa masyarakat merasa kebijakan ini tidak disampaikan dengan *framing* yang tepat. *Framing* adalah proses seleksi dan penekanan aspek tertentu dari realitas untuk membentuk interpretasi tertentu di benak audiens (Entman, 1993). Dalam kasus ini, kebijakan larangan penjualan gas oleh pengecer tanpa sosialisasi yang memadai menciptakan *framing* negatif di kalangan masyarakat, yang menganggap bahwa pemerintah tidak memperhatikan kebutuhan mereka.

Kelangkaan gas LPG 3 kg tidak hanya menyulitkan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan energi sehari-hari, tetapi juga memiliki dimensi kemanusiaan yang mendalam. Dalam rentang waktu tiga hari di awal Februari 2025, dua insiden tragis terjadi akibat kelangkaan gas LPG 3 kg (Jawa Pos, 2025). Seorang lansia meninggal dunia setelah mengantre gas melon di salah satu pangkalan di Pamulang Barat, Tangerang Selatan. Insiden kedua dialami oleh warga Desa Dempet, Jawa Tengah, yang tewas terlindas truk saat pulang dari mencari gas melon di Desa Kebonagung. Tragedi ini memicu kemarahan publik dan mempertanyakan efektivitas kebijakan subsidi LPG bersubsidi. Dalam dinamika persepsi publik, insiden ini menjadi pemicu bagi munculnya resistensi terhadap kebijakan larangan penjualan gas oleh pengecer. Isu-isu yang berkaitan dengan kesejahteraan

masyarakat dapat memperkuat *framing* negatif terhadap kebijakan publik jika pemerintah gagal memberikan solusi yang memadai (Gamson & Modigliani, 1989).

Untuk dapat memahami dinamika persepsi publik terhadap kebijakan LPG bersubsidi secara sistematis, penelitian ini menggunakan pendekatan sentimen analisis melalui instrumen kuesioner yang dirancang berdasarkan indikator-indikator kunci. Kuesioner tersebut difokuskan pada pengukuran persepsi masyarakat terhadap efektivitas distribusi gas LPG 3 kg, tingkat kepuasan terhadap implementasi kebijakan, serta dampak kelangkaan gas terhadap aspek ekonomi dan sosial. Responden dalam penelitian ini dibagi menjadi dua kelompok utama: masyarakat umum sebagai konsumen akhir dan agen penjual sebagai pelaku distribusi. Selain itu, segmentasi demografis seperti rentang umur, gender, dan tingkat pendapatan bulanan digunakan untuk mengidentifikasi pola perbedaan persepsi di antara kelompok masyarakat yang beragam. Dengan mengadopsi metode sentimen analisis, penelitian ini bertujuan untuk menghasilkan data empiris yang dapat memberikan wawasan mendalam tentang faktor-faktor yang memengaruhi persepsi publik terhadap kebijakan LPG bersubsidi, sehingga dapat menjadi dasar bagi formulasi kebijakan yang lebih responsif dan inklusif.

Rentetan peristiwa tersebut, mulai dari kesulitan akses di tingkat akar rumput hingga gelombang kritik di media digital, tidak hanya mencerminkan dinamika persepsi publik biasa. Fenomena ini secara kumulatif menimbulkan pertanyaan mendasar tentang legitimasi kebijakan energi pemerintah di mata publik. Oleh karena itu, penelitian ini menjadi penting untuk menganalisis bagaimana persepsi

yang terbentuk tersebut berdampak langsung pada kepercayaan dan citra pemerintah sebagai penyelenggara kebijakan.

1.2. Rumusan Masalah

- a. Bagaimana dinamika persepsi publik terhadap kebijakan LPG bersubsidi secara nasional pada tahun 2025?
- b. Faktor-faktor apa saja yang memengaruhi pembentukan persepsi publik terkait kebijakan LPG bersubsidi secara nasional?
- c. Bagaimana persepsi publik yang terbentuk mengenai kebijakan LPG bersubsidi tahun 2025 berdampak pada legitimasi pemerintah dan para aktor kebijakan terkait??

1.3. Tujuan Penelitian

- a. Mengidentifikasi dinamika persepsi publik terhadap kebijakan LPG bersubsidi secara nasional pada tahun 2025.
- b. Menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi pembentukan persepsi publik terkait kebijakan LPG bersubsidi secara nasional.
- c. Menganalisis dampak persepsi publik yang terbentuk mengenai kebijakan LPG bersubsidi tahun 2025 terhadap legitimasi pemerintah dan para aktor kebijakan terkait.

1.4. Batasan Penelitian

- a. Penelitian ini hanya menganalisis persepsi publik yang terbentuk di platform media digital YouTube, khususnya pada kolom komentar video terkait kebijakan distribusi LPG bersubsidi tahun 2025.

- b. Objek penelitian dibatasi pada video-video YouTube yang secara spesifik membahas kebijakan distribusi LPG bersubsidi dan diunggah oleh kanal berita nasional, kanal pemerintahan, atau kanal publik populer selama rentang waktu Januari 2025 hingga April 2025.
- c. Objek video yang dianalisis dibatasi pada video berdurasi panjang (bukan *YouTube Shorts*), dengan durasi minimal 5 menit yang membahas secara eksplisit kebijakan distribusi LPG bersubsidi.
- d. Data yang dianalisis merupakan komentar publik (*user-generated comments*) yang bersifat terbuka dan relevan dengan topik, dengan bahasa utama yang digunakan adalah Bahasa Indonesia.
- e. Teknik analisis yang digunakan adalah analisis framing untuk mengetahui cara media video membingkai informasi kebijakan LPG bersubsidi.
- f. Teknik analisis yang digunakan adalah sentimen analisis untuk mengukur persepsi publik (positif, negatif, atau netral) berdasarkan komentar pengguna YouTube.
- g. Pembahasan dibatasi pada dinamika kebijakan tahun 2025 dan respons publik di YouTube untuk menjaga fokus penelitian pada studi kasus yang spesifik dan mendalam, mengenai bagaimana kebijakan baru di era digital direspons oleh masyarakat.

1.5. Manfaat Penelitian

1.5.1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini dapat digunakan untuk menguji dan memperkaya teori-teori yang berkaitan dengan pembentukan persepsi publik, seperti teori *framing*, *agenda-setting*, dan teori komunikasi politik. Selain itu, penelitian ini berpotensi memberikan wawasan baru tentang bagaimana faktor-faktor seperti media massa, komunikasi pemerintah, dan pengalaman langsung masyarakat saling berinteraksi dalam membentuk persepsi publik terhadap kebijakan publik. Hasil penelitian ini juga dapat menjadi referensi bagi studi-studi lanjutan tentang dinamika persepsi publik dalam konteks kebijakan subsidi energi di Indonesia.

1.5.2. Manfaat Praktis

Bagi pemerintah dan aktor kebijakan, penelitian ini memberikan pemahaman tentang bagaimana persepsi publik di era digital secara langsung mengikis atau membangun legitimasi kebijakan. Hasil analisis dapat menjadi dasar untuk merumuskan strategi komunikasi publik yang lebih empatik dan responsif, guna memulihkan kepercayaan publik dan mengelola citra institusi dalam menghadapi krisis kebijakan energi.

Bagi media massa, penelitian ini dapat menjadi panduan untuk menyampaikan informasi terkait kebijakan LPG bersubsidi secara objektif dan proporsional, sehingga dapat memengaruhi persepsi publik secara positif.

Bagi masyarakat, khususnya kelompok pedagang kecil dan nelayan yang paling terdampak oleh kelangkaan gas, penelitian ini diharapkan dapat

meningkatkan pemahaman tentang mekanisme distribusi gas bersubsidi dan cara menyuarakan aspirasi kepada pemerintah.

Dengan demikian, penelitian ini dapat berkontribusi pada peningkatan transparansi dan akuntabilitas dalam implementasi kebijakan subsidi energi.

1.6. Tinjauan Pustaka

Aris Sarjita (2024) melakukan penelitian tentang mekanisme interaksi antara para pemimpin sipil dan pejabat militer dalam merumuskan kebijakan pertahanan, serta bagaimana sentimen public yang dibentuk oleh media tradisional dan media digital mempengaruhi keputusan-keputusan strategis. Dengan menggunakan metode penelitian kualitatif, khususnya analisis data sekunder berupa studi kasus dan literatur ilmiah, penelitian ini menyelidiki tiga bidang utama: dampak hubungan sipil-militer terhadap kebijakan pertahanan, peran persepsi publik dan pengaruh media, serta interaksi antara hubungan sipil-militer dan persepsi publik. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa pernyataan publik dan liputan media oleh para pemimpin militer memiliki dampak signifikan dalam membentuk persepsi publik, yang pada gilirannya memberikan tekanan kepada para pemimpin sipil untuk menyesuaikan kebijakan pertahanan. Sebagai contoh, penarikan AS dari Afghanistan dipaparkan sebagai studi kasus utama yang menunjukkan bagaimana menurunnya dukungan public yang dipengaruhi oleh gambaran media dan penilaian militer mendorong perubahan kebijakan strategis. Kajian ini menyimpulkan bahwa memahami keterkaitan antara hubungan sipil-militer dan persepsi publik sangatlah penting bagi pembuatan kebijakan pertahanan yang efektif dan demokratis.

Penelitian yang dilakukan Maulidia dan Saragih (2024) bertujuan untuk menganalisis reaksi publik terhadap unggahan Instagram @jktinfo pada tanggal 27 Maret 2023 dengan judul "*Minister of Trade Will Destroy Imported Used Clothes*". Penelitian ini menggunakan paradigma positivisme dan metode kuantitatif berupa analisis isi (*content analysis*) untuk memahami persepsi publik yang tercermin dalam komentar pengguna. Unit analisis dalam penelitian ini adalah persepsi publik, yang dikategorikan menjadi tiga dimensi utama: persepsi positif, negatif, dan netral. Dari total populasi sebanyak 2.257 komentar, penelitian ini mengambil sampel sebanyak 339 komentar melalui teknik random sampling, dengan validitas dan reliabilitas data diuji menggunakan rumus *Hostly* antar-pengkode. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mayoritas komentar cenderung bersifat negatif, dengan persentase mencapai 77% (263 komentar), sementara persepsi positif hanya mencapai 19% (63 komentar), dan persepsi netral sebesar 4% (13 komentar). Penelitian ini juga mengidentifikasi lima sub-dimensi gaya bahasa yang digunakan dalam komentar, yaitu ironi, sinisme, sarkasme, satire, dan insinuasi. Sinisme menjadi sub-dimensi paling dominan dalam persepsi negatif, dengan jumlah mencapai 92 komentar, yang menunjukkan penolakan dan ketidaksetujuan masyarakat terhadap kebijakan Menteri Perdagangan untuk memusnahkan pakaian bekas impor.

Penelitian yang dilakukan oleh Izza (2023) mengulas peran krusial media pers dalam membentuk dan merefleksikan persepsi publik pada dua periode yang berbeda: masa liberal dan masa terpimpin. Penelitian ini menggunakan metode analisis konten media, dan survei untuk memahami dinamika peran media pers

dalam kedua konteks tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada masa liberal, media pers berfungsi sebagai penjaga demokrasi dengan memfasilitasi kebebasan berekspresi dan menyediakan platform untuk berbagai sudut pandang. Sebaliknya, pada masa terpimpin, media cenderung menjadi alat kontrol narasi pemerintah, digunakan untuk menyampaikan pesan-pesan yang sesuai dengan kebijakan resmi. Temuan ini menunjukkan perbedaan signifikan dalam peran media pers antara kedua masa tersebut, yang mempertegas dampaknya terhadap dinamika persepsi publik. Pada masa liberal, media mampu menciptakan ruang diskusi yang lebih terbuka, sehingga persepsi publik lebih beragam dan independen. Namun, pada masa terpimpin, kontrol ketat terhadap media menyebabkan pembentukan persepsi publik yang lebih homogen dan searah dengan narasi pemerintah.

Penelitian yang dilakukan Sania, dkk (2025) dengan tujuan mengidentifikasi tingkat kepuasan masyarakat terhadap kebijakan naturalisasi pemain sepak bola oleh PSSI serta dampaknya terhadap prestasi Tim Nasional Indonesia. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan mengumpulkan data melalui kuesioner daring kepada 300 responden yang memiliki minat pada sepak bola nasional, serta memanfaatkan data sekunder untuk memperkuat analisis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar responden mendukung kebijakan naturalisasi karena dianggap mampu meningkatkan pengalaman dan daya saing internasional Timnas. Namun, terdapat kritik terkait potensi pengurangan kesempatan bagi pemain lokal, yang mencerminkan polarisasi persepsi publik antara kebutuhan jangka pendek (peningkatan prestasi) dan pembangunan jangka panjang (pengembangan pemain lokal).

1.7. Kerangka Teori

1.7.1. Persepsi Publik

a) Definisi Persepsi Publik

Persepsi publik dapat didefinisikan sebagai proses di mana masyarakat secara kolektif menyeleksi, mengorganisasi, dan menginterpretasikan informasi dari lingkungan mereka untuk menciptakan sebuah gambaran dunia yang bermakna. Menurut Walter Lippmann (2017) dalam karyanya yang fundamental, *Public Perception*, individu tidak merespons realitas objektif secara langsung, melainkan merespons "gambaran di dalam kepala mereka" (*pictures in their heads*) yang telah dibentuk oleh berbagai sumber informasi. Dalam konteks penelitian ini, persepsi publik merujuk pada cara masyarakat memahami, menafsirkan, dan memberi makna terhadap kebijakan pembatasan LPG bersubsidi, yang pada akhirnya akan menentukan sikap dan persepsi mereka.

b) Peran Framing Media dalam Mengonstruksi Persepsi

Persepsi publik tidak terbentuk dalam ruang hampa; ia sangat rentan terhadap proses konstruksi sosial, di mana media massa memainkan peran sebagai arsitek utama. Di sinilah Teori *Framing* menjadi krusial. Framing menjelaskan bagaimana realitas sosial tidak hanya “ditemukan” secara objektif, melainkan dibentuk melalui proses seleksi dan penekanan informasi oleh komunikator. Robert Entman (1993) mendefinisikannya sebagai proses menyeleksi aspek tertentu dari sebuah realitas dan membuatnya lebih menonjol (*salient*) dalam sebuah teks komunikasi. Dengan kata lain, media tidak memberitahu audiens apa yang harus dipikirkan, tetapi bagaimana cara memikirkannya dengan menonjolkan definisi masalah, diagnosis

penyebab, evaluasi moral, dan rekomendasi solusi tertentu. Dalam penelitian ini, framing berita tentang kelangkaan gas akan secara langsung memengaruhi apakah publik mempersepsikan kebijakan ini sebagai "kegagalan pemerintah" atau sebagai "langkah efisiensi yang perlu".

c) Faktor-Faktor Lain yang Memengaruhi Persepsi Publik

Selain framing media yang menjadi fokus utama, persepsi publik juga dibentuk oleh interaksi kompleks dari beberapa faktor lain:

- **Komunikasi Pemerintah:** Cara pemerintah mengomunikasikan tujuan dan alasan di balik sebuah kebijakan secara signifikan memengaruhi persepsi awal publik. Komunikasi yang efektif, transparan, dan empatik dapat membangun persepsi positif, sementara komunikasi yang minim atau teknokratis dapat memicu persepsi negatif dan kecurigaan.
- **Pengalaman Langsung (Lived Experience):** Persepsi tidak hanya dibentuk oleh media, tetapi juga oleh pengalaman nyata. Pengalaman warga yang harus mengantre berjam-jam atau kesulitan mencari gas di pengecer menjadi bukti empiris personal yang akan memperkuat persepsi negatif yang disajikan oleh media.
- **Interaksi Sosial dan Digital:** Di era digital, persepsi juga dibentuk melalui diskusi di tingkat komunitas dan media sosial. Sebuah keluhan personal yang diviralkan dapat dengan cepat diadopsi menjadi persepsi kolektif, menciptakan tekanan sosial yang mengkonfirmasi atau bahkan menantang framing dari media arus utama.

1.7.2. Teori Framing

a) Definisi Framing

Teori *framing* pertama kali diperkenalkan oleh Robert M. Entman (1993) dalam artikelnya "*Framing: Toward Clarification of a Fractured Paradigm*". Menurut Entman, *framing* adalah proses seleksi dan penekanan aspek tertentu dari realitas untuk membentuk interpretasi tertentu di benak audiens. Dalam komunikasi publik, *framing* tidak hanya melibatkan pemilihan informasi atau fakta mana yang akan disampaikan, tetapi juga bagaimana informasi tersebut disampaikan agar dapat memengaruhi cara audiens memahami suatu isu. Proses ini melibatkan dua elemen utama:

- Seleksi berarti melakukan pemilihan informasi atau aspek tertentu dari realitas yang dianggap relevan serta dapat disampaikan.
- Penekanan berarti menonjolkan aspek tertentu dari informasi tersebut untuk menciptakan makna tertentu yang dapat memengaruhi cara audiens memahami isu.

Dalam penelitian ini, *framing* digunakan untuk menganalisis bagaimana media massa, pemerintah, dan masyarakat membingkai isu kelangkaan gas LPG bersubsidi di Kota Cirebon. Misalnya, jika media massa membingkai kelangkaan gas sebagai "kegagalan distribusi" atau "dampak kebijakan larangan penjualan oleh pengecer," maka persepsi masyarakat terhadap kebijakan ini akan cenderung negatif. Sebaliknya, jika pemerintah membingkai kebijakan ini sebagai "upaya transparansi distribusi," maka masyarakat mungkin lebih mendukung kebijakan tersebut.

Analisis framing dipilih karena mampu melampaui analisis sentimen yang hanya mengukur 'suka' atau 'tidak suka'. Framing membongkar *bagaimana* sebuah isu dikonstruksi, siapa yang dijadikan 'korban' dan 'pelaku', sehingga kita bisa memahami *akar* dari pembentukan sentimen negatif tersebut.

b) Tokoh-Tokoh Kunci dalam Sejarah Framing

Dalam perkembangan teori framing, terdapat beberapa tokoh penting yang memberikan kontribusi fundamental dalam membangun konsep, pendekatan, dan aplikasinya dalam kajian komunikasi massa. Berikut adalah tiga tokoh kunci yang sering dijadikan rujukan dalam studi framing, khususnya dalam konteks analisis media dan kebijakan publik:

A. Erving Goffman

Goffman dianggap sebagai pelopor teori framing modern melalui karya monumentalnya *Frame Analysis* (1974). Ia memperkenalkan konsep frame sebagai “struktur kognitif” yang membantu individu memahami dan mengorganisasi pengalaman sosial mereka. Goffman menekankan bahwa pengalaman sosial tidak berdiri sendiri, melainkan selalu diinterpretasi dalam konteks kerangka berpikir tertentu yang memandu persepsi dan tindakan seseorang. Pendekatan ini sangat berpengaruh dalam memahami bagaimana realitas sosial dikonstruksi secara subjektif dan bagaimana komunikasi terjadi dalam interaksi sehari-hari.

B. Todd Gitlin

Sebagai salah satu tokoh penting dalam studi media dan gerakan sosial, Todd Gitlin memperluas teori framing ke ranah komunikasi massa. Dalam bukunya *The Whole World Is Watching* (1980), Gitlin mengkaji bagaimana media arus utama memproduksi dan mengontrol narasi tentang gerakan sosial dan protes politik. Ia menyoroti bagaimana media menggunakan framing untuk “menjinakkan” gerakan oposisi dengan cara membatasi interpretasi dan menonjolkan aspek tertentu yang menguntungkan status quo. Kontribusi Gitlin sangat berharga dalam menganalisis bagaimana kekuatan media dapat membentuk persepsi publik terhadap isu-isu kontroversial.

C. Robert Entman

Robert Entman adalah tokoh sentral dalam pengembangan framing modern yang paling banyak digunakan dalam penelitian komunikasi saat ini. Dalam artikelnya yang sangat berpengaruh tahun 1993 berjudul *Framing: Toward Clarification of a Fractured Paradigm*, Entman memberikan definisi operasional framing yang sistematis dan aplikatif, yaitu proses memilih aspek tertentu dari suatu realitas dan menonjolkan aspek tersebut dalam pesan komunikasi untuk membentuk definisi masalah, interpretasi sebab-akibat, evaluasi moral, dan rekomendasi solusi. Pendekatan Entman memudahkan peneliti untuk menganalisis secara komprehensif bagaimana media membingkai isu dan bagaimana framing tersebut mempengaruhi pemahaman serta sikap publik.

c) **Aktor Framing**

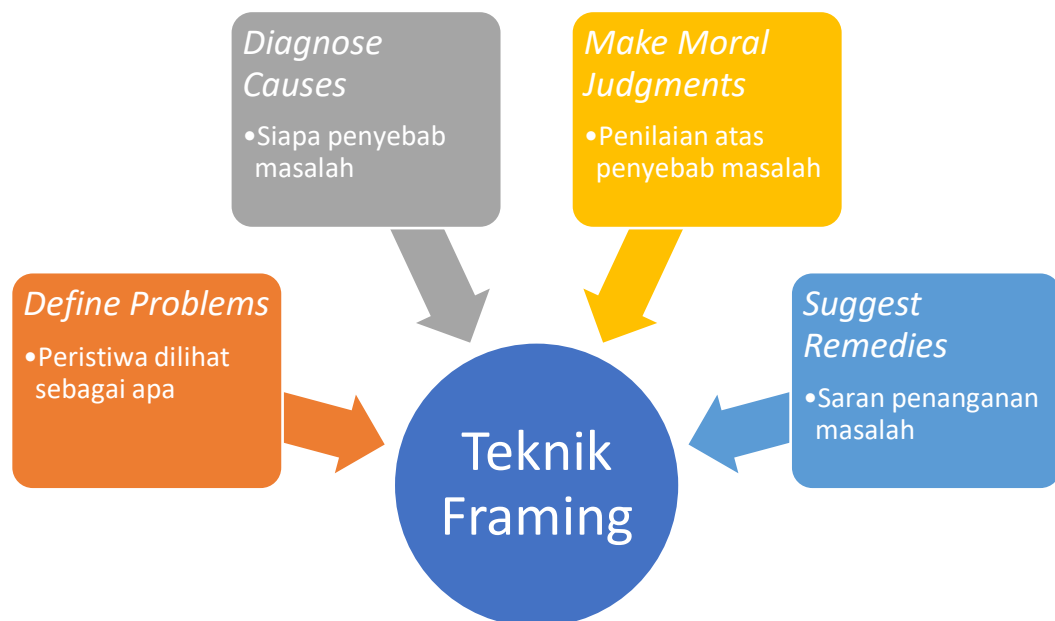
Aktor *framing* merupakan pihak-pihak yang terlibat dalam peristiwa pemingkai suatu isu. Dalam proses *framing*, ada beberapa aktor utama yang memainkan peran penting dalam membentuk narasi suatu isu. Pada penelitian ini, aktor *framing* meliputi tiga kelompok utama: media massa, pemerintah, dan masyarakat .

- Pemerintah berperan sebagai pembuat kebijakan. Pemerintah berusaha membingkai kebijakan larangan penjualan gas oleh pengecer secara positif, misalnya dengan menekankan bahwa kebijakan ini bertujuan untuk "transparansi distribusi" dan "mencegah penyelewengan."

Namun, jika sosialisasi kebijakan ini minim atau tidak jelas, maka *framing* negatif dari media massa atau masyarakat dapat mendominasi.

- Masyarakat sebagai penerima *framing* memiliki peran aktif dalam merespons narasi yang disampaikan. Masyarakat dapat merespons *framing* secara positif dengan memberikan dukungan atau secara negatif dalam bentuk resistensi, tergantung pada bagaimana mereka memahami isu tersebut. Misalnya, jika masyarakat merasa bahwa kebijakan ini menyusahkan mereka, maka mereka cenderung membingkai kebijakan ini sebagai "tidak adil" atau "tidak memperhatikan kebutuhan rakyat."

d) Proses *Framing*



Gambar 1 Skema Elemen dalam Teknik Framing

Robert Entman (1993) mendefinisikan framing sebagai proses seleksi dan penonjolan aspek-aspek tertentu dari realitas yang kemudian digunakan untuk

membentuk makna dan pandangan publik atas suatu isu. Dalam teori Entman, framing terdiri dari empat elemen utama yang saling terkait:

1. Definisi masalah (*Problem Definition*), yaitu menentukan apa yang menjadi inti dari suatu isu. Dalam penelitian ini, masalah utama yang dibingkai adalah "kelangkaan gas LPG bersubsidi." Media massa mungkin mendefinisikan masalah ini sebagai "kegagalan distribusi," sementara pemerintah mungkin mendefinisikannya sebagai "tantangan implementasi kebijakan baru."
2. Diagnosis penyebab (*Causal Interpretation*), yaitu mengidentifikasi siapa atau apa yang bertanggung jawab atas masalah tersebut. Misalnya, media massa mungkin menyalahkan larangan penjualan oleh pengecer sebagai penyebab utama kelangkaan gas, sementara pemerintah mungkin menyalahkan kurangnya stok dari distributor.
3. Evaluasi moral (*Moral Judgment*), yaitu menilai apakah masalah tersebut baik atau buruk secara moral. Media massa mungkin menilai bahwa larangan penjualan oleh pengecer adalah "tidak adil bagi masyarakat kecil," sementara pemerintah mungkin menilai bahwa kebijakan ini adalah "langkah yang tepat untuk memastikan distribusi tepat sasaran."
4. Rekomendasi solusi (*Treatment Recommendation*), yaitu memberikan solusi atau tindakan yang harus diambil untuk

mengatasi masalah. Media massa mungkin menyarankan agar pemerintah meningkatkan sosialisasi atau memperbaiki rantai pasok distribusi, sementara pemerintah mungkin menyarankan agar masyarakat membeli gas langsung dari pangkalan resmi.

e) **Jenis-Jenis *Framing***

Framing dapat dibagi menjadi beberapa jenis berdasarkan tujuan dan konteksnya:

1. *Framing* Positif vs. Negatif

Framing positif menonjolkan aspek-aspek baik dari suatu isu untuk menciptakan persepsi yang mendukung. Misalnya, pemerintah mungkin membingkai kebijakan larangan penjualan oleh pengecer sebagai "langkah untuk memastikan transparansi distribusi" atau "upaya mencegah penyelewengan." Sebaliknya, *framing* negatif menonjolkan aspek-aspek buruk dari suatu isu untuk menciptakan persepsi yang kritis. Misalnya, media massa mungkin membingkai kebijakan ini sebagai "menyusahkan masyarakat kecil" atau "tidak memperhatikan kebutuhan rakyat."

2. *Framing* Episodik vs. Tematik

Framing episodik fokus pada cerita individu atau insiden tertentu, seperti meninggalnya seorang ibu akibat kelangkaan gas atau antrean panjang warga di pangkalan resmi. *Framing* semacam ini cenderung memicu emosi audiens karena menyoroti dampak langsung dari suatu isu. Di sisi lain, *framing* tematik fokus pada gambaran besar atau tren umum, seperti data statistik tentang kelangkaan gas di Kota Cirebon atau analisis tentang efektivitas kebijakan subsidi energi. Kedua jenis *framing* ini

saling melengkapi dalam membentuk narasi yang memengaruhi dinamika persepsi publik terhadap kebijakan LPG bersubsidi.

f) Penerapan Teori dalam Kebijakan Publik

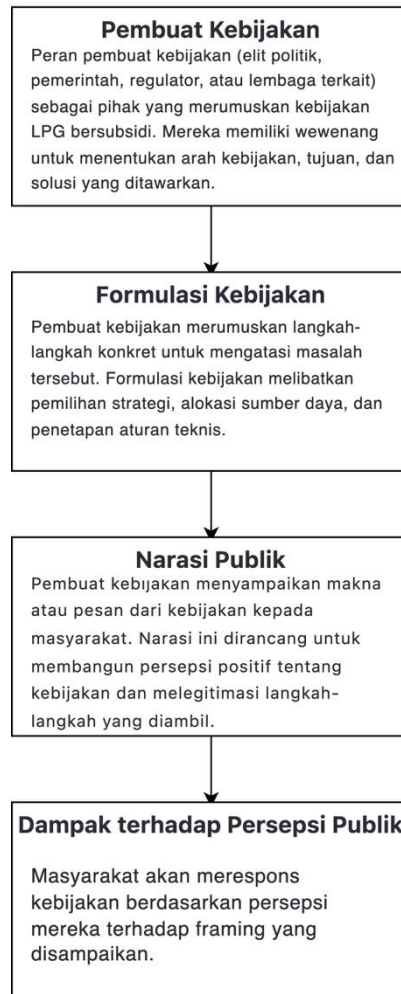
Teori framing menjadi alat analisis yang sangat relevan dan penting dalam memahami bagaimana kebijakan publik diterima, dipahami, dan dikritisi oleh masyarakat luas. Dalam kebijakan distribusi LPG 3 kg bersubsidi, penerapan teori framing tidak hanya membantu melihat isi kebijakan itu sendiri, tetapi juga bagaimana kebijakan tersebut “dibungkus” dan dikomunikasikan di ruang publik, yang pada akhirnya memengaruhi legitimasi dan efektivitasnya.

Kebijakan publik, terutama yang berdampak luas dan sensitif seperti subsidi energi, tidak bisa dipisahkan dari dimensi komunikasi dan konstruksi makna. Media massa dan media digital adalah arena utama di mana narasi tentang kebijakan tersebut dibangun, diperkuat, atau dipatahkan. Setiap frame yang dibentuk oleh media atau aktor sosial lain menjadi filter yang menentukan bagaimana masyarakat memahami “masalah”, siapa yang dianggap sebagai “penyebab”, bagaimana penilaian moral dijatuhkan, serta solusi apa yang dianggap layak.

Dalam era digital, YouTube menjadi salah satu platform utama di mana framing kebijakan berlangsung secara intensif dan terbuka. Berbeda dengan media tradisional yang lebih terstruktur, YouTube memungkinkan berbagai aktor, mulai dari pemerintah, media arus utama, komunitas pengecer, hingga warga biasa, untuk bersuara dan membentuk narasi mereka sendiri. Frame yang muncul di YouTube

ini cenderung lebih emosional, personal, dan mudah menyebar viral, sehingga memiliki potensi besar memengaruhi persepsi publik secara cepat.

1.8. Kerangka Pemikiran



Gambar 2 Framing Supra Structure

Gambar 2 menunjukkan *framing* pada tingkat supra structure merujuk pada cara pembuat kebijakan, elit politik, dan institusi pemerintah membangun narasi atau perspektif tertentu terkait suatu isu untuk memengaruhi persepsi publik dan legitimasi kebijakan. Framing *supra structure* dimulai dengan identifikasi masalah oleh pembuat kebijakan, seperti kelangkaan gas bersubsidi yang dianggap disebabkan oleh distribusi tidak merata atau penyalahgunaan oleh pihak-pihak tertentu, seperti pengecer ilegal. Selanjutnya, pembuat kebijakan merumuskan solusi melalui kebijakan, seperti larangan penjualan gas oleh pengecer ilegal atau penggunaan kartu khusus untuk subsidi tepat sasaran, yang kemudian dikomunikasikan kepada masyarakat melalui media massa, pidato resmi, atau kampanye sosial.



Gambar 3 Framing Grassroot

Gambar 3 menunjukkan *framing* pada tingkat *grassroot* mengacu pada cara masyarakat, sebagai penerima kebijakan, memaknai, menafsirkan, dan merespons narasi atau *framing* yang disampaikan oleh pembuat kebijakan. Masyarakat tidak hanya menerima *framing* secara pasif, tetapi juga menginterpretasikannya berdasarkan pengalaman langsung, nilai-nilai lokal, dan informasi alternatif yang mereka peroleh dari lingkungan sekitar atau media digital. Misalnya, jika elit menyatakan bahwa kelangkaan gas bersubsidi disebabkan oleh ulah pengecer ilegal, masyarakat mungkin justru melihat masalah distribusi sistemik sebagai penyebab utama. Pengalaman lapangan, seperti kesulitan mendapatkan gas bersubsidi meskipun sudah menggunakan kartu khusus, sering kali bertentangan dengan *framing* resmi, sehingga memicu sentimen negatif atau bahkan resistensi. Masyarakat juga dapat membentuk *counter-narrative*, seperti menyalahkan buruknya sistem distribusi atau adanya dugaan mafia gas, sebagai bentuk penolakan terhadap *framing* supra structure.



Gambar 4 Hubungan Supra Structure dan Grassroot

Gambar 3 menunjukkan hubungan antara *supra structure*, *grass root*, dan *framing* kebijakan mencerminkan dinamika interaksi antara pembuat kebijakan dan masyarakat dalam menyikapi suatu isu publik. Pada tingkat *supra structure*, pembuat kebijakan (elit politik, pemerintah, atau regulator) membangun *framing* kebijakan dengan mendefinisikan masalah, menawarkan solusi, dan menyampaikan narasi melalui media massa atau saluran komunikasi resmi untuk memengaruhi

persepsi publik. Namun, di tingkat *grass root*, masyarakat tidak selalu menerima framing tersebut secara mentah-mentah. Mereka memaknai framing berdasarkan pengalaman langsung, nilai-nilai lokal, dan realitas lapangan yang mereka hadapi, seperti kelangkaan gas LPG bersubsidi atau kesulitan mendapatkan akses terhadap subsidi tepat sasaran.

Respons *grass root* ini kemudian menjadi feedback bagi *supra structure*, yang dapat memicu revisi kebijakan atau peneguhan *framing* awal. Dengan demikian, hubungan antara *supra structure* dan *grass root* adalah siklus interaktif yang saling memengaruhi, di mana keberhasilan implementasi kebijakan bergantung pada sejauh mana framing elit sejalan dengan pengalaman dan aspirasi masyarakat.

1.9. Metode Penelitian

1.9.1. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan *mixed methods* (kombinasi kualitatif dan kuantitatif) karena bertujuan untuk memahami dinamika persepsi publik terhadap kebijakan LPG bersubsidi secara mendalam. Menurut Creswell (2018) dalam buku “*Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*”, pendekatan *mixed methods* digunakan ketika peneliti ingin menggabungkan kekuatan data kualitatif (narasi, interpretatif) dan kuantitatif (numerik, statistik) untuk memberikan wawasan yang lebih komprehensif tentang fenomena yang diteliti. Dalam konteks penelitian ini, pendekatan *hybrid* dipilih untuk mengakomodasi dua tujuan utama:

1. Metode kuantitatif digunakan untuk menganalisis dinamika persepsi publik secara numerik melalui kuesioner dengan skala Likert dan analisis sentimen berbasis NLP (*Natural Language Processing*). Data kuantitatif ini memungkinkan peneliti untuk mengukur tingkat kepuasan/ketidakpuasan masyarakat, distribusi sentimen (positif, negatif, netral), serta faktor-faktor yang memengaruhi persepsi publik.
2. Metode kualitatif digunakan untuk mengeksplorasi narasi, framing, dan konten dari media massa, pemerintah, serta masyarakat terkait kebijakan larangan penjualan gas oleh pengecer. Data kualitatif diperoleh melalui observasi, dan dokumentasi.

Dengan menggabungkan kedua metode ini, penelitian ini dapat memberikan gambaran yang lebih lengkap tentang dinamika persepsi publik terhadap kebijakan LPG bersubsidi. Pendekatan *hybrid* ini memungkinkan peneliti untuk tidak hanya menjelaskan fenomena secara deskriptif dan interpretatif, tetapi juga mengukur pola-pola tertentu secara objektif melalui analisis statistik. Selain itu, pendekatan ini mendukung analisis framing, naratif, dan konten untuk memahami dinamika persepsi publik secara komprehensif, sekaligus memberikan rekomendasi kebijakan yang berbasis data empiris.

1.9.2. Lokasi dan Waktu Penelitian

a) Lokasi Penelitian

Lokus penelitian ini sepenuhnya bersifat digital dan tidak terikat pada batasan geografis tertentu. Fokus utama penelitian adalah ruang publik digital yang terbentuk pada platform media digital YouTube. Dengan demikian, "lokasi" penelitian ini adalah kanal-kanal YouTube dan kolom komentar tempat diskursus mengenai kebijakan LPG bersubsidi berlangsung secara organik. Pendekatan ini dipilih untuk menangkap spektrum persepsi publik yang lebih luas dan representatif secara nasional, melampaui batas-batas wilayah administratif.

b) Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan selama periode Februari–April 2025. Fokus utama pengumpulan data dilakukan melalui teknik pengambilan data dari media digital pada rentang waktu tersebut. Pemilihan periode ini didasarkan pada tujuan untuk memahami puncak dinamika persepsi publik yang terjadi tepat sebelum, saat, dan sesaat setelah kebijakan distribusi penjualan gas oleh pengecer mulai diberlakukan dan kemudian direvisi.

1.9.3. Teknik Pengumpulan Data

a) Observasi

Teknik observasi digunakan untuk mengumpulkan data primer melalui pengamatan langsung terhadap fenomena yang diteliti, seperti antrean panjang di pangkalan resmi atau aktivitas pengecer yang masih menjual gas bersubsidi. Observasi dilakukan secara partisipatif, di mana peneliti terlibat langsung dalam

situasi lapangan untuk memahami dinamika distribusi gas dan respons masyarakat. Menurut Bogdan dan Biklen (2007) dalam buku “*Qualitative Research for Education: An Introduction to Theories and Methods*”, observasi partisipatif memungkinkan peneliti untuk memperoleh data yang lebih autentik karena melibatkan interaksi langsung dengan subjek penelitian. Dalam penelitian ini, observasi difokuskan pada perilaku masyarakat di pangkalan resmi, interaksi antara pedagang kecil dan nelayan dengan distributor, serta dampak kelangkaan gas terhadap aktivitas sehari-hari.

b) Pengambilan Data di Media digital

Teknik utama pengambilan data dalam penelitian ini adalah melalui ekstraksi data secara otomatis dari YouTube, untuk mengumpulkan persepsi publik terkait kebijakan LPG bersubsidi. Teknik ini dilakukan dengan menggunakan alat bantu seperti web scraping tools atau API (*Application Programming Interface*) yang disediakan oleh platform media digital. Data yang dikumpulkan mencakup postingan, komentar, ulasan, dan diskusi terkait kelangkaan gas, harga LPG bersubsidi, serta kebijakan distribusi.

Data yang diperoleh kemudian dianalisis menggunakan metode Natural Language Processing (NLP) untuk mengidentifikasi sentimen publik (positif, negatif, atau netral), tren persepsi, dan topik-topik dominan yang muncul. Menurut Sugiyono (2019) dalam buku *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, penggunaan teknologi digital seperti pengambilan data memungkinkan peneliti untuk mengumpulkan data dalam jumlah besar secara sistematis dan real-time.

Dengan pendekatan ini, penelitian ini dapat menghasilkan data yang representatif dan mencerminkan dinamika persepsi publik secara nasional.

c) **Dokumentasi**

Dokumentasi penting untuk mendukung data primer dengan informasi yang lebih objektif dan terukur. Menurut Arikunto (2013) dalam buku “Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik”, dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data yang efektif untuk memperoleh informasi historis, legal, atau statistik. Dalam penelitian ini, dokumentasi digunakan untuk menganalisis kebijakan larangan penjualan gas oleh pengecer, tren distribusi gas bersubsidi, serta insiden-insiden yang terkait dengan kelangkaan gas.

1.9.4. Teknik Analisis Data

a) **Analisis *Framing***

Teknik analisis *framing* digunakan untuk memahami bagaimana media massa membingkai isu kelangkaan gas LPG bersubsidi. Menurut Entman (1993) dalam artikel "*Framing: Toward Clarification of a Fractured Paradigm*", analisis *framing* melibatkan identifikasi empat elemen utama: definisi masalah, diagnosis penyebab, evaluasi moral, dan rekomendasi solusi. Dalam penelitian ini, analisis *framing* dilakukan untuk mengidentifikasi bagaimana media lokal di Kota Cirebon membingkai kelangkaan gas sebagai "kegagalan distribusi" atau "dampak kebijakan larangan penjualan oleh pengecer." Teknik ini memungkinkan peneliti untuk memahami bagaimana *framing* media memengaruhi persepsi publik terhadap kebijakan ini.

b) Analisis Konten

Teknik analisis konten digunakan untuk menganalisis data dokumentasi, seperti artikel media dan laporan pemerintah. Menurut Krippendorff (2013) dalam buku “*Content Analysis: An Introduction to Its Methodology*”, analisis konten melibatkan identifikasi pola-pola tertentu dalam teks untuk memahami makna yang terkandung di dalamnya. Dalam penelitian ini, analisis konten dilakukan untuk mengidentifikasi tren distribusi gas bersubsidi, serta bagaimana kebijakan larangan penjualan gas oleh pengecer dilaporkan oleh media massa.

1.9.5. Sumber Data

a) Data Primer

Data primer diperoleh dari hasil observasi lapangan dan pengambilan data media digital. Menurut Neuman (2002) dalam buku “*Social Research Methods: Qualitative and Quantitative Approaches*”, data primer merupakan data yang dikumpulkan langsung dari sumber aslinya untuk menjawab pertanyaan penelitian. Dalam penelitian ini, data primer mencakup:

- **Observasi Lapangan:** Pengamatan langsung terhadap dinamika distribusi gas LPG bersubsidi, seperti antrean panjang di pangkalan resmi, aktivitas pengecer ilegal, serta dampak kelangkaan gas terhadap masyarakat.
- **Data Komentar:** Data diperoleh melalui teknik pengambilan dari platform YouTube. Teknik ini menggunakan alat bantu seperti *web scraping tools* atau API (*Application Programming Interface*) untuk

mengumpulkan postingan, komentar, ulasan, dan diskusi terkait kebijakan LPG bersubsidi, kelangkaan gas, harga, serta isu-isu distribusi. Data yang dikumpulkan kemudian dianalisis menggunakan metode *Natural Language Processing* (NLP) untuk mengidentifikasi sentimen publik (positif, negatif, atau netral), tren persepsi, dan topik-topik dominan yang muncul.

b) Data Sekunder

Menurut Neuman (2002) dalam buku “*Social Research Methods: Qualitative and Quantitative Approaches*”, data sekunder adalah data yang telah dikumpulkan oleh pihak lain untuk tujuan lain yang kemudian digunakan kembali atau dianalisis ulang untuk kepentingan penelitian. Artinya, ini adalah data "tangan kedua" atau data yang sudah ada. Dalam penelitian ini, sumber data primer bersifat tunggal dan sepenuhnya digital, yaitu:

- Konten Video YouTube: Video-video dari kanal berita seperti Metro TV dan Kompas TV yang menjadi lokus penelitian. Video ini diperlakukan sebagai data sekunder karena merupakan produk media yang sudah ada dan berfungsi sebagai stimulus yang memicu lahirnya data primer (komentar publik).
- Dokumen Resmi Pemerintah: Siaran pers, laporan, dan dokumen kebijakan lain yang dikeluarkan oleh lembaga terkait seperti Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Dokumen

ini digunakan untuk memahami narasi dan justifikasi resmi dari pemerintah.

- Artikel Berita dan Liputan Media: Artikel berita dari media daring nasional dan lokal digunakan untuk mengidentifikasi bagaimana isu kelangkaan gas dibingkai (framing) oleh media massa secara lebih luas dan untuk memahami kronologi peristiwa.
- Studi dan Literatur Akademis: Jurnal, buku, dan penelitian terdahulu digunakan sebagai landasan teori dan untuk membandingkan temuan penelitian dengan studi relevan yang sudah ada.